

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Republik Rakyat China merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur, dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sekitar 1,4 milyar, luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi dan ibu kota-nya terletak di Beijing. (Rachmawati, 2019) China kini menjadi raksasa ekonomi dunia baru penantang hegemoni Paman Sam yang susah ditiru dan bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 telah membuat China jadi negara adidaya seperti sekarang ini. Kesuksesan ini mengantarkan China menjadi kekuatan ekonomi dunia. China sudah melangkah jauh ke depan. China memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang baik. Negara itu juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global selama tiga dekade ini.

Kesuksesan China diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping (1978-1989). Reformasi telah membawa perekonomian China yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu ekonomi China tumbuh 10% rata-rata per tahun. Sejak awal 1980-an kebanyakan ekonomi di China telah diswastakan dan memberikan efek peningkatan pada perekonomiannya meskipun tetap dibawah pengawasan pemerintah. China gencar melakukan Investasi luar negeri. Perusahaan-perusahaan China meningkatkan targetnya untuk berinvestasi di Asia Tenggara (rakhma, 2017). Di Malaysia, China melakukan pembangunan proyek kereta sepanjang 640 kilometer yang didanai dengan pinjaman China pada masa pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak (Cnn, 2019). Di Thailand, Pada tahun 2018, Alibaba, Perusahaan *e-commerce* terbesar asal China menanamkan investasi senilai US\$320 juta (Rp 4,4 triliun) ke

"digital hub" di *Eastern Economic Corridor* (EEC) milik pemerintahan militer Thailand (natalia, 2018).

Investasi China di Indonesia terbilang cukup banyak. Diantaranya, Proyek *High Speed Train* atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG). Yang ditandatangani pada 4 April 2017. Selain itu, Investasi Tsingshan Group dengan Bintang Delapan Group dan PT Indonesia Morowali Industrial Park, bekerja sama untuk pembangunan pembangkit listrik di kawasan Industri Morowali, dengan kapasitas 700 Megawatt dan nilai investasi US\$ 650 juta (hamdani, 2019). Di Vietnam, China melalui Perusahaan Jinhua Chunguang, pembuat produk karet, mengumumkan akan berinvestasi US\$ 4,35 juta untuk mendirikan basis produksi di Vietnam. Selain itu, perusahaan furnitur Zhejiang Henglin *Chair Industry* berinvestasi sebesar US\$ 48 juta, di mana mereka mengakuisisi pabrik milik Taiwan (hamdani, 2019).

China berinfestasi di kawasan Asia Tenggara memiliki alasan dan pandangan tersendiri. Letak geografis yang strategis, serta kekayaan sumber-sumber alamnya, Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat tepat untuk berinvestasi. Posisi Asia Tenggara tepat di persimpangan antara konsentrasi industri, teknologi dan kekuatan militer di Asia Timur Laut ke utara, sub-kontinental dan sumber-sumber minyak di Timur Tengah ke Timur, dan Australia ke Selatan (Matamatapolitik, 2018).

Minimnya *foreign direct investment* (FDI) ke negara ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pemangku kepentingan negeri ini. Perlu ditemukan solusi dari kondisi Indonesia yang kalah saing dibandingkan dengan negara serumpun di Asia Tenggara. Maka dari itu pemerintah membuat beberapa kebijakan guna menarik Investor asing untuk masuk ke Indonesia. Diantaranya yakni, *Omnibus law* atau juga dikenal dengan istilah *omnibus bill* adalah kebijakan pembuatan regulasi berbasis undang-undang (UU) baru dengan mengamandemen beberapa UU sekaligus (indonesia.go.id, 2019).

Latar belakang pemerintah untuk mempercepat disahkannya RUU *Omnibus Law* tak lain karena harapan bahwa investasi kelak menjadi daya ungkit perekonomian nasional. Sementara menurut data dari BKPM (2019), realisasi investasi dalam negeri dan investasi asing sebesar Rp 200,5 triliun dengan komposisi PMA sebesar Rp 104,9 triliun (52,3%) dan PMDN 95,6 triliun (47,7%) pada Triwulan II tahun 2019. Sektor yang menjadi primadona untuk PMA adalah Listrik, Gas, dan Air dengan nilai investasi sebesar USD 1.350,5 juta. Dengan demikian RUU *Omnibus Law* merupakan kekuatan supra-struktur untuk menarik investor sebanyak mungkin untuk berinvestasi di Indonesia (Haryono, 2020).

Seiring dengan pemangkasan regulasi, pemerintah juga akan mempercepat reformasi birokrasi. Caranya dimulai dengan mengubah pola pikir dan cara kerja birokrat untuk memudahkan calon investor, bukan mempersulit investor. Begitu juga dengan keterjangkauan dan ketersediaan bahan baku dan harga energi yang kompetitif (indonesia.go.id, 2019). Selain itu, Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Benny Soetrisno, selama ini kita tidak jelas arahnya ingin konsentrasi mengembangkan industri apa. Seolah-olah semua sektor ingin ditarik, dan akhirnya hasilnya tidak maksimal. Maka dari itu, Upaya yang dilakukan pemerintah guna menarik investor asing adalah dengan memetakan industri unggulan Tanah Air dan penurunan perizinan investasi (Andri, 2019).

Indonesia masih sangat membutuhkan Investasi dari negara-negara asing. Hal ini guna pembiayaan program percepatan pembangunan nasional, Investasi asing membantu penyerapan tenaga kerja dll. Maka dari itu, di Indonesia ada UU yang mengatur tentang Investasi. Yakni dalam *UU No. 25 Tahun 2007*. UU ini membahas berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal sebagai bentuk investasi utama. Kegiatan investasi atau penanaman modal yang dijelaskan dalam UU ini diselenggarakan dengan beberapa asas seperti; Kepastian hukum, Keterbukaan,

Akuntabilitas, Pelakuan adil yang tidak bisa dilihat karena perbedaan Negara, Kemandirian, Kebersamaan, Berkelanjutan dan Ada keseimbangan dengan kesatuan ekonomi Indonesia (Noviyanto, n.d.).

Relokasi adalah pemindahan lokasi industri dari suatu negara maju ke negara berkembang atau dari satu negara ke negara lain karena pertimbangan tertentu dan menghasilkan jenis barang yang mampu bersaing di pasar internasional (Achmad, 2019). Dalam hal ini, China merelokasi perusahaannya yang diakibatkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Hal ini berdampak signifikan pada kondisi perekonomian global termasuk negara-negara kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia khususnya. Perang tarif antara AS dan China saat ini merupakan gejala dari serangkaian permasalahan yang sangat mendasar yakni terkait dengan adanya ketidaksetaraan dalam globalisasi. Beberapa persaingan tidak *fair* antara negara kaya ditambah persaingan geo-ekonomi dan politik antara kepemimpinan China dan AS serta sistem perdagangan yang berbasis pada aturan saat ini tidak memadai lagi dalam menghadapi kebangkitan suatu negara khususnya pada negara besar seperti China dan Amerika Serikat.

Indonesia selama ini menjadi partner penting bagi negara China, Negeri Tirai Bambu tersebut menjadi raksasa ekonomi di tengah kelesuan global belakangan ini. Investasi negara itu terus merangkak naik. Pada tahun 2013, misalnya, investasi China di Indonesia jumlahnya sebesar 297 juta dolar AS dan bertengger di posisi 12, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi peringkat ke-9 dengan investasi 628 juta dolar AS. China sebagai negara ketiga yang paling banyak berinvestasi di Indonesia pada tahun 2017 dengan 3,36 miliar dolar AS. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) 2016 menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* dari Tiongkok ke Indonesia tercatat ada sejumlah 1.734 proyek dengan nilai 2,665 miliar

dolar AS. Tren ini meningkat, signifikan dibandingkan dengan nilai realisasi dua tahun sebelumnya (BKPM, 2018).

Realisasi investasi asing dari Tiongkok sepanjang semester pertama 2018 mencapai US\$ 1,34 miliar setara Rp 18 triliun atau sebesar 8,8% dari total Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia sebesar US\$ 15,27 miliar. Pada periode Januari-September 2018 jumlah proyek hanya 1.059 unit dengan nilai US\$1,83 miliar. Nilai investasi dari Negeri Tirai Bambu tersebut berada di urutan ketiga terbesar. Ditahun 2019 jumlah proyek investasi dari China yang direalisasikan di Indonesia selama periode Januari-September 2019 mencapai 1.888 unit dengan nilai US\$3,31 miliar. Pada saat yang sama, China menghadapi dilemma untuk memilih Indonesia atau Vietnam, Pada akhirnya China memilih Vietnam meskipun Indonesia sudah melakukan lobi-lobi agar China mengalihkan ke Indonesia

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh penulis diatas, Maka rumusan masalahnya adalah Mengapa China lebih memilih merelokasi perusahaannya ke Vietnam dibandingkan ke Indonesia.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam kasus ini, dapat dilihat China merupakan negara kekuatan ekonomi baru yang mampu memberikan pasokan dana bagi negara sekitarnya, yaitu negara-negara kawasan Asia Tenggara (Indonesia-Vietnam). Untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka penulis menggunakan kerangka pemikiran yakni, Teori *Rational Choice*.

1. Teori *Rational Choice*

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*) Boudon (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata “rasional” dimana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses kognisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah “*utility maximizing approach*” berupa teori bahwa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya.

Boudon (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam postulat, yaitu: (1) setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb., (2) perilaku dapat dipahami. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan, sedangkan postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadiankejadian yang dapat dipahami. Adapun postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu (3) perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikiran. Postulat keempat didasarkan pada pernyataan (4) bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Sedangkan postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu (5) penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (*egoisme*). Sedangkan postulat terakhir menyatakan bahwa (6) individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya.

Hakikat teori *rational choice* ini adalah memusatkan perhatian pada individu dalam pemerintahan dan pembuatan keputusan pemerintah.

Teori ini didasarkan pada asumsi nilai dan melakukan penilaian berdasarkan *cost and benefit* (baik-buruk atau untung ruginya) sebuah kebijakan baru (Mos'ed. 1998:4). Rasionalitas di sini merujuk pada *cost and benefit* atau Axelrod menyebutnya dengan *payoff structure*. Asumsinya, bila rasionalitas berdasarkan untung rugi, maka, akan dapat membuat keputusan yang sesuai dengan alternatif yang ia anggap paling menguntungkan bagi kepentingannya. Dengan demikian, kerjasama hanya terbentuk kalau menguntungkan, kalau tidak menguntungkan tidak akan terjadi.

Dalam proses pembuatan keputusan, baik pada level mikro maupun makro, setiap aktor memiliki pertimbangan-pertimbangan rasional guna mencapai keuntungan maksimal. Pertimbangan tersebut didasarkan pada berbagai pengetahuan, informasi, serta data yang memberikan sumbangan kognitif kepada aktor. Dalam hal ini, aktor merupakan aparatur atau tokoh yang berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan, baik atas nama pribadi maupun perwakilan organisasi. Pada level mikro, pembuatan keputusan terfokus pada masyarakat seperti misalnya keluarga. Sedangkan pada tingkat makro, pembuatan keputusan ini diterapkan pada tingkat global yang menyangkut hubungan antar negara. Teori Pilihan Rasional merupakan salah satu perangkat akademis yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu keputusan dibuat, untuk mencapai tujuan yang dipandang maksimal. Dalam hal negara, keputusan itu dibuat demi mencapai tujuan atau kepentingan dari negara, baik yang bersifat politis maupun bukan. Teori Pilihan Rasional berasal dari ilmu sosiologi. Akan tetapi, karena dalam pembuatan keputusan pada level antar negara juga dilakukan oleh individu atau kelompok, korporasi dan aktor lainnya, yang juga menjadi salah satu kajian dari teori pilihan rasional,

maka teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat global.

Berdasarkan penjelasan James S. Coleman, salah satu sumber yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan pada teori pilihan rasional adalah aktor dan sumber daya. Dalam hal ini, aktor berperan dalam menjalankan dan mengendalikan sumber daya terhadap mereka yang mencari sumber daya (Ritzer, 2007). Dari pandangan ini dapat dikatakan bahwa kontrol atas sumber daya sangat bergantung pada kemampuan dari aktor yang bersangkutan, berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang paling menguntungkan baginya. Aktor dalam hal ini dapat berbentuk korporat (kelompok) atau individu. Dari pandangan inilah kemudian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan aktor yang membuat keputusan demi tujuan dari negara. Seperti yang dikatakan oleh Brian Fay, bahwa salah satu tugas utama dari ilmu sosial interpretif adalah menemukan niat atau latar belakang aktor dalam melakukan suatu tindakan (Gibbon, 2002). Inilah yang secara historis disebut dengan *verstehen*. Maka, untuk dapat menemukan rasionalitas dari suatu tindakan yang dilakukan negara, dilakukan penafsiran terhadap keputusan tersebut, berdasarkan pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan.

Teori pilihan rasional dapat diterapkan di level masyarakat, baik pada sektor budaya maupun politik. Selanjutnya, pendapat yang menekankan pada komponen kognitif dalam melakukan pertimbangan demi membuat keputusan juga didukung oleh pendapat Philip Mellor (1999) yang menyatakan bahwa proses belajar (kognitif) itu tidak hanya didapatkan dari akumulasi mengumpulkan informasi semata tetapi juga sebuah fenomena yang dipengaruhi oleh hubungan dengan teman, keluarga, komunitas serta kekuatan-

kekuatan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam teori pilihan rasional digunakan pertimbangan-pertimbangan kognitif yang mengedepankan keuntungan paling maksimal bagi pihak-pihak yang menerapkannya.

Apabila individu dan kelompok dapat menerapkan teori ini untuk mencapai kepentingannya maka hal ini juga berlaku bagi negara. Negara yang dijalankan oleh pemerintah, pada hekekatnya digerakkan oleh individu dan kelompok. Mereka inilah yang membuat keputusan-keputusan dalam pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan politik luar negeri dan domestik dari suatu negara, teori pilihan rasional ini bermanfaat untuk menerangkan atau mengetahui alasan negara dalam membuat kebijakan-kebijakan politik tertentu. Politik luar negeri suatu negara merupakan kepanjangan dari politik dalam negerinya (Holsti, 1987).

Keuntungan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui Teori *Rational Choice* dalam kasus China merelokasikan perusahaannya ke Vietnam menghadirkan beberapa keuntungan yakni dari sisi ekonomi dan politik. Dalam skripsi ini, pilihan rasional yang diambil oleh China ke Vietnam guna mendapatkan keuntungan adalah dalam beberapa hal diantaranya, Letak atau posisi Geografis Vietnam yang lebih berdekatan dengan China, Sehingga dapat menghemat biaya transportasi, Vietnam memberikan insentif dan kemudahan investasi yang lebih baik dibandingkan Indonesia. yaitu dari sisi kemudahan perizinan serta Vietnam memberikan insentif berupa pajak dan upah buruh yang rendah, Vietnam memiliki kesamaan ideologi dengan China sehingga memudahkan negosiasi bisnis.

D. HIPOTESA

Dengan melihat pokok permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan hipotesa yaitu:

China lebih memilih melakukan relokasi perusahaannya ke Vietnam dibandingkan ke Indonesia karena beberapa alasan yakni :

- A.** Letak atau posisi Geografis Vietnam yang lebih berdekatan dengan China, Sehingga dapat menghemat biaya transportasi.
- B.** Vietnam memberikan insentif dan kemudahan investasi yang lebih baik dibandingkan Indonesia. yaitu dari sisi kemudahan perizinan serta Vietnam memberikan insentif berupa pajak dan upah buruh yang rendah.
- C.** Vietnam memiliki kesamaan ideologi dengan China sehingga memudahkan negosiasi bisnis.

E. TUJUAN PENELITIAN

- 1.** Mengetahui fokus investasi China di kawasan Asia Tenggara.
- 2.** Mengetahui alasan China merelokasikan perusahaannya ke Vietnam dibandingkan ke Indonesia.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Mengingat masalah yang dibahas cukup luas maka untuk mempermudah menganalisa permasalahan diatas maka akan dibatasi dari tahun 2015-2019. Tahun 2015-2019 merupakan era dimana dijalankannya strategi-strategi dan kebijakan terhadap pemberian investasi di kedua negara tersebut oleh China dan beberapa faktor yang menjadikan perbedaan jumlah investasi di kedua negara tersebut.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif atau deskriptif yaitu dengan melihat dan mendeskripsikan fakta-fakta dan strategi China sebelum berinvestasi di Indonesia-Vietnam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mencari daftar pustaka, *library research* dan mencari sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar, artikel dan internet.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Landasan teori, Hipotesa, Tujuan penelitian, Jangkauan penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB 2 : Hubungan China dan Asia Tenggara, Kondisi Dan Potensi Asia Tenggara, Kepentingan Ekonomi China, Investasi China

Di Asia Tenggara, Perbandingan Indonesia Dan Vietnam.

BAB 3 : Alasan China Lebih Memilih Merelokasi Perusahaannya Ke Vietnam Dibandingkan Ke Indonesia, Kebijakan Relokasi Perusahaan Oleh China Ke Vietnam, Alasan Kedekatan Geografis, Faktor Kebijakan Akan Kemudahan Investasi, Faktor Kedekatan Ideologi Politik.

BAB 4 : Kesimpulan.